

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Reformasi tidak sepenuhnya telah mengalami reformasi ketika melihat situasi politik Indonesia saat ini. Impian dari reformasi adalah keluar dari otoritarianisme dan menuju demokratisasi yaitu kelahiran partisipasi politik secara langsung sehingga rakyat dapat mempengaruhi kebijakan publik. (Prasisko, 2016). Upaya reformasi dengan melakukan transisi politik, seperti desentralisasi kekuasaan, peningkatan kebebasan pers, dan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka dan adil faktanya belum menghasilkan demokrasi yang diimpikan sebab budaya oligarki Orde Baru masih eksis di sepanjang masa reformasi ini. Oligarki yang semula bergantung pada Suharto sebagai oligarki utama berhasil beradaptasi dengan menjalin kerjasama dengan partai politik bahkan beberapa oligarki mampu menguasai partai politik untuk mempertahankan kekuasaannya di era reformasi. (Muhammad Faisal, 2024)

Menurut Laegreid, Oligarki tidak dapat dikatakan sistem aturan, tetapi seperangkat aktor tertentu. Sehingga apabila seperangkat aktor ini masih ada, maka oligarki itu tetap ada meskipun sistem aturan telah berubah. (Laegreid, 2011). Mereka menggunakan kekayaan dan koneksi untuk mempengaruhi partai politik, media, dan proses pemilihan, untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap terkonsentrasi di tangan segelintir orang (oligarkis). Hal ini selaras dengan pendapat dari Koho (2021) bahwa Oligarki merupakan sekelompok orang (elit) yang memiliki kekuasaan dalam sistem politik dan kelompok elit tersebut mampu mengendalikan pemerintahan dengan berbagai cara sehingga rakyat dapat ditundukkan. (Koho, 2021).

Sebagaimana disebutkan bahwa oligarki telah banyak menguasai partai politik. (Muhammad Faisal, 2024). Hal yang dapat menjelaskan bagaimana oligarki memerlukan partai politik untuk mempertahankan kekuasaannya adalah bahwa partai politik merupakan lembaga yang akan menghasilkan tokoh pembuat kebijakan publik yang akan memengaruhi kehidupan oligarki. Maka dari itu, partai politik berkompetisi dengan ketat agar dapat memenangkan pemilihan umum meskipun harus mengeluarkan modal besar. Sistem politik yang mahal inilah yang menyebabkan pemilihan kepada daerah didominasi oleh partai politik. (Novita, 2014). Sedangkan, calon independen maupun kelompok marginal sulit bersaing dengan lawan yang terafiliasi dengan partai politik dan mendapat dukungan oligarki. (Agus Nurulsyam Suparman, 2017)

Di Indonesia, pencalonan kepala daerah lebih dominan oleh partai politik dibanding pencalonan independen. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.3 Tahun 2017 Pencalonan kepala daerah memiliki dua jalur yaitu jalur partai politik dan jalur perseorangan atau biasa disebut jalur independen dengan persyaratan bahwa untuk diajukannya pencalonan bagi partai politik adalah harus memiliki minimal 20% dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir. Sedangkan persyaratan bagi pencalonan independen adalah calon harus memperoleh dukungan dalam bentuk KTP dari sejumlah pemilih sesuai jumlah yang ditetapkan oleh KPU tingkat daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017)

Pada pilkada serentak yang diadakan di Indonesia terakhir kali pada tahun 2020 dengan diikuti oleh 270 daerah, dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten, sebagian besar pencalonan adalah melalui jalur partai politik. (Saihu, 2021). Tercatat dari keseluruhan yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2020, hanya terdapat 68 pasangan calon kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan, dimana hanya enam di antaranya yang menang. (Irwan Syambudi, 2020). Hal ini menjadikan persentase kemenangan seluruh pasangan calon kepala daerah jalur independen di tahun 2020 adalah sebesar 8,8% sedangkan persentase jumlah kepala daerah yang berasal dari jalur independen di Indonesia hanya sebesar 2,2%. Dengan demikian, persentase kemenangan paslon yang diusung partai politik mencapai lebih dari 90%.

Pencalonan melalui partai politik memiliki banyak keuntungan terlebih dalam hal persentase kemenangan karena partai politik memiliki sumber daya dan infrastruktur organisasi yang kuat, meliputi jaringan kader, relawan, dan basis pemilih yang berperan penting dalam kampanye dan mobilisasi pemilih. Proses pengenalan kandidat partai kepada masyarakat cenderung lebih cepat karena identitas partai yang telah familiar serta terdapat stigma bahwa calon partai dinilai lebih kredibel sebab telah melewati proses seleksi internal partai. Akan tetapi, dalam realitas politik saat ini, pencalonan oleh partai politik sudah tidak banyak merepresentasikan identitas partai, hal ini dikarenakan partai terkadang bersikap pragmatis dengan berpaku kepada kekuatan modal yang dimiliki calon. Modal politik itu sendiri dapat berupa jabatan politik, reputasi, legitimasi, pengalaman mengorganisasi massa, keturunan elit politik, dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. (Vikalista, Wati, & Anwar, 2020).

Hal ini dikarenakan bahwa partai politik sendiri dihadapkan dengan pragmatisme tentang mahalanya penyelenggaraan demokrasi akibat ketatnya kompetisi antar partai politik. (Agus Nurulsyam Suparman, 2017).

Dalam konteks pilkada, pelaku oligarki dapat berasal dari kalangan pebisnis yang dalam skala lokal disebut sebagai *local strongman*, dan dapat berasal dari kalangan politisi seperti pejabat partai politik, pejabat publik, petahana dan kandidat elektoral. Meski Pilkada berada di tingkat daerah, tidak menutup kemungkinan bahwa oligarki di tingkat nasional juga dapat bermain dalam kepentingan pilkada seperti konglomerat, presiden, birokrat, lembaga hukum, media massa, serta ketua umum partai politik. Bentuk paling umum dari praktik oligarki partai politik adalah patronalistik yang difasilitasi dengan sentralistik kewenangan partai dan diwarnai dengan keberadaan politik dinasti yang merujuk pada dominasi keluarga dan kekerabatan dari para oligarki yang berkuasa. Oligarki dan hubungan kekerabatan sering dijadikan sebagai modal politik pencalonan dalam pilkada karena menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadrul Imam dan Titin Purwaningsih (2022), bahwa setiap kandidat membutuhkan modal politik sebagai kendaraan untuk memenangkan Pilkada sedangkan dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan politik keluarga terbukti memberi peluang kemenangan yang besar. (Imam & Purwaningsih, 2022)

Adanya dominasi oligarki dalam partai politik mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di dalam partai karena keputusan dan kebijakan partai menjadi bias karena seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan oligarki dibandingkan aspirasi anggotanya yang tak lain adalah kader dan

konstituen partai. Sejatinya, partai politik dirujuk sebagai pilar demokrasi karena peran dan fungsinya sebagai aspirasi kepentingan kelompok masyarakat, yang dilanjutkan melalui fungsi kaderisasi dan kandidasi. Menurut Caton, dalam sebuah negara demokrasi, partai politik memiliki 4 fungsi yaitu artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, serta pengawasan terhadap pemerintahan. (Pamungkas, 2011). Maka dari itu, partai politik seharusnya mengumpulkan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat kemudian mengartikulasikannya melalui visi dan misi partai yang dibawa ke dalam bursa elektoral melalui kandidatnya yang telah melalui proses rekrutmen yang kompeten dan berintegritas.

Kehadiran jaringan oligarki dalam partai politik mengancam integritas dari partai politik itu sendiri, yang terindikasi dengan hilangnya agregasi kepentingan masyarakat dalam visi dan misi yang dibawa serta hingga melemahnya nilai kandidasi dimana kaderisasi dan pendidikan politik mulai dikesampingkan dan tergantikan dengan massifnya kandidasi yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan dengan oligarki yang berkuasa dalam pemilihan kepada daerah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Aisah Putri Budiatri bahwa telah terjadi kegagalan partai politik dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan kader internal partai oleh banyaknya kandidat berbasis kekerabatan yang bukanlah politisi berpengalaman di bidang pencalonan. (Aziz & Wahid, 2021).

Sebagai partai yang paling banyak memenangkan elektoral di era reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disebut PDI Perjuangan pernah berkomitmen untuk memprioritaskan kadernya dalam hal kandidasi

kepala daerah yang terimplementasi dalam sistem rekrutmen tertutup. Akan tetapi, hal ini telah berubah karena kini PDI Perjuangan telah berkomitmen untuk bersifat terbuka dalam hal rekrutmen kepala daerah. Sistem rekrutmen terbuka ini memberikan peluang bagi partai politik untuk memilih kandidat potensial secara lebih luas sedangkan dari sisi partisipasi publik juga menjadi terbuka yang artinya kader internal dan eksternal berkesempatan sama untuk dapat berkompetisi menjadi kandidat PDI Perjuangan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Harjuno Saputro, dkk., yaitu bahwa Pola rekrutmen yang digunakan oleh PDI Perjuangan adalah terbuka, dalam artian terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat dan ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah dari PDI Perjuangan. (Saputro, Kurniawan, & Juantara, 2023)

Dengan perubahan sistem rekrutmen menjadi terbuka, sifat PDI Perjuangan justru semakin tertutup dalam hal transparansi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pelimpahan kewenangan kepada ketua umum partai untuk melakukan kandidasi tanpa melakukan konvensi. Artinya, siapa saja memang dapat mencalonkan diri sebagai kandidat PDI Perjuangan dalam selektoral, tetapi tetap keputusan ada di tangan ketua umum partai dan pertimbangan dari keputusan ini adalah bersifat tertutup karena tidak diadakan forum diskusi terkait dengan penetapan kandidasi. (Siti Witianti N. N., 2021). Dengan demikian, celah untuk bersifat pragmatis terbuka lebar yakni partai dapat memilih kandidat berdasarkan kriteria yang tidak tetap dan rahasia. Seperti yang dijelaskan oleh Harjanto bahwa parpol yang seharusnya menjadi institusi utama pengembangan demokrasi seringkali juga mengalami konflik internal sebagai akibat tidak berjalannya mekanisme demokrasi di dalamnya. (Harjanto, 2021).

Kandidasi yang tertutup dan rahasia seringkali menimbulkan ketegangan dan memunculkan banyak pertanyaan terkait dengan pertimbangan apa yang sebenarnya dipakai oleh ketua umum dalam membuat keputusan. Tidak jarang bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan hingga menyebabkan kandidat yang berasal dari kader internal memutuskan untuk meninggalkan PDI Perjuangan. Contohnya, pada pilkada tingkat kota/kabupaten tahun 2020 di Demak, PDI Perjuangan memilih untuk mengusung kandidat dari eksternal partai bernama Eisti'anah yang berlatar belakang sebagai anak dari pengusaha ternama di Kota Demak sebagai kandidatnya alih-alih mengusung Mugiyono yang telah menjadi kader internal PDI Perjuangan selama 21 tahun. Akibatnya, PDI Perjuangan harus kehilangan Mugiyono yang akhirnya menjadi kandidat dari partai Gerindra. (Fitriyah, Herawati, & Marlina, *Jumping over Fences: Story from Demak Local Election*, 2021)

Hal serupa juga terjadi di Kota Surakarta, PDI Perjuangan memutuskan mengusung Gibran Rakabuming Raka yang merupakan outsider partai berlatar belakang dinasti menggantikan Achmad Purnomo yang merupakan kader internal partai sekaligus petahana wakil walikota pada dua periode sebelumnya. (Hakim, 2021). Di tingkat Provinsi, PDI Perjuangan pernah kehilangan dua kadernya sekaligus yang merupakan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2008-2013; Rustriningsih dan Bibit Waluyo. Keduanya memilih untuk berada di kubu oposisi ketika keputusan ditetapkan secara tertutup untuk mengusung kader lamanya; Ganjar Pranowo pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013. (Drs. Susilo Utomo, 2015).

Beberapa kasus di atas terjadi berdasarkan keputusan prerogatif ketua umum partai. Hal ini menjadi catatan bahwa sentralistik membuka peluang bagi oligarki untuk membiaskan keputusan partai dalam hal kandidasi kepala daerah. Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah peneliti tuliskan sebelumnya, terdapat sebuah kasus yang menarik bagi peneliti untuk dianalisis lebih lanjut yaitu mengenai kandidasi Gibran Rakabuming Raka yang berlatar belakang dinasti dalam Pilkada Kota Surakarta 2020. Pada fenomena tersebut, terjadi proses penggalan pencalonan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Achmad Purnomo yang merupakan kader internal PDI Perjuangan dan merupakan petahana Wakil Wali Kota Surakarta periode jabatan 2015-2020. Achmad Purnomo sendiri direkomendasikan sebagai kandidat PDI Perjuangan berdasarkan penjangkaran internal di tingkat cabang atau DPC. Sedangkan, Gibran Rakabuming Raka sendiri memiliki fakta menarik yaitu latar belakang keluarganya dimana ia merupakan anak dari tokoh elit PDI Perjuangan sekaligus Presiden definitif Indonesia; Joko Widodo. (Tirto.id, 2020)

Dampak dari pengusungan Gibran Rakabuming Raka ini sempat menimbulkan ketegangan di dalam kelembagaan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta yang disinyalir dengan penolakan pendaftaran administratif pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta hingga kemudian Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah. Pencalonan diri untuk maju dalam pilkada melalui partai PDI Perjuangan memang dibuka pendaftarannya di tiap tingkatan kelembagaan partai yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pada tingkat kota/kabupaten, Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

pada tingkat provinsi, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada tingkat nasional. Kala itu Achmad Purnomo didaftarkan dan direkomendasikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sebagai aspirasi dari para kader dan juga para ranting (simpatisan). Sehingga DPC PDI Perjuangan tidak lagi menerima pencalonan selain daripada Achmad Purnomo karena telah dianggap sebagai kandidat terbaik berdasarkan penjangkaran PDI Perjuangan di Surakarta yang diperkuat pula oleh hasil survei yang diadakan oleh Unisri dan Median pada 2019 dimana Achmad Purnomo memiliki poin tertinggi pada bidang popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. (CNBC Indonesia, 2019), (Lembaga Survei Median, 2019).

Tabel 1.1. Hasil Survei Bakal Calon Walikota Surakarta Tahun 2019

No	Aspek Polling	Hasil Survei Unisri		Hasil Survei Median	
		Achmad Purnomo	Gibran Rakabuming	Achmad Purnomo	Gibran Rakabuming
1	Popularitas	90%	90%	94%	82%
2	Akseptabilitas	83%	61%	-	-
3	Elektabilitas	38%	13%	45%	24,4%

Sumber: (CNBC Indonesia, 2019), (Lembaga Survei Median, 2019)

Berdasarkan hasil survei kedua lembaga tersebut, dapat dilihat bahwa Achmad Purnomo merupakan kader yang telah memiliki cukup kekuatan untuk masuk ke dalam bursa elektoral. Survei yang diadakan Lembaga Survei Median juga mengungkapkan tiga alasan teratas masyarakat Kota Surakarta memilih

Gibran Rakabuming Raka yaitu: berusia muda (27,8%), putra Presiden Joko Widodo (18,5%), dan pengusaha kreatif (13%). Sedangkan alasan teratas untuk memilih Achmad Purnomo adalah berpengalaman (42,5%), merakyat (8,3%), dan belum adanya calon lain (6,1%). Adapun survei ini dilakukan sebelum penetapan kandidasi PDI Perjuangan.

Selain disinyalir sebagai bentuk sentralistik kewenangan yang berpusat pada ketua umum partai bersama oligarkinya, kandidasi Gibran Rakabuming Raka juga disuarakan sebagai praktik politik dinasti yang diusahakan oleh Joko Widodo. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta; Fx. Hadi Rudyatmo dalam wawancaranya bersama Puthut EA di sebuah platform media sosial youtube menyebutkan bahwa Joko Widodo pernah mendatangnya secara langsung dan mengatakan bahwa putranya; Gibran Rakabuming Raka berkeinginan untuk maju dalam Pilkada Kota Surakarta 2020. (Purnawan S. Adi; Ali Ma'ruf; Muhamad Shiddiq; Januar Dhika; Iradat Ungkai, 2023). Sebagai sosok penting dalam PDI Perjuangan, pernyataan Joko Widodo ini patut dipertanyakan korelasinya dengan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan rekomendasi ketua umum partai.

Proses Kandidasi PDI Perjuangan dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, dipilih untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bahwa praktik oligarki yang turut diwarnai dengan politik dinasti dalam kandidasi kepala daerah telah terjadi dan sayangnya tidak dapat dicegah karena kandidatnya berhasil memenangkan elektoral. Asumsi dasar yang peneliti gagas adalah bahwa kandidasi Gibran Rakabuming Raka yang

dilakukan PDI Perjuangan pada Pilkada Kota Surakarta di tahun 2020 telah melibatkan campur tangan penguasa sehingga terjadi kompetisi yang tidak adil bagi lawan saing yang tersisih; Achmad Purnomo. Penelitian ini peneliti cita-citakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan secara khusus peneliti ingin memacu kepedulian pembaca terkait dengan transparansi proses kandidasi kepala daerah untuk meningkatkan kualitas kandidat dalam bursa elektoral.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisikan pokok inti permasalahan berupa pertanyaan yang dijadikan dasar dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha untuk memberikan jawaban yang sistematis dan kredibel dari pertanyaan ini. Adapun hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk dominasi oligarki dalam kandidasi kepala daerah oleh PDI Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk dominasi politik dinasti dalam kandidasi kepala daerah oleh PDI Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk dominasi oligarki dalam pencalonan kepala daerah oleh PDI Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk dominasi dinasti politik dalam pencalonan kepala daerah oleh PDI Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020

1.4 Manfaat

Melalui penelitian ini, akan didapatkan manfaat berupa manfaat teoritis yaitu yang berkaitan dengan pengembangan teori dan pengetahuan, serta manfaat praktis yang berkaitan dekat dengan dampak yang dapat dirasakan secara langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu politik dan pemerintahan yang telah ada saat ini, khususnya mengenai oligarki, politik dinasti, regulasi kandidasi kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih perhatian pada isu dominasi oligarki dan politik dinasti dalam partai politik dan sebagai acuan untuk menyelenggarakan rekrutmen bakal calon kepala daerah dengan lebih kompeten.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai oligarki dan politik dinasti di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para pendahulu. Sebagaimana peneliti yang tertarik meneliti mengenai fenomena dominasi oligarki dan politik dinasti dalam regulasi kandidasi kepala daerah yang dilakukan oleh salah satu partai politik terkuat di Indonesia yaitu PDI Perjuangan yang dibatasi dalam studi kasus kandidasi pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, peneliti bermaksud untuk mencantumkan beberapa studi kepustakaan dari penelitian terdahulu yang telah ada ke dalam sub bab penelitian ini sebagai tambahan wawasan informasi yang diharapkan

dapat memperkaya pengetahuan kita semua dan untuk mencari posisi dari penelitian yang akan dilakukan kemudian serta untuk memastikan orisinalitas penelitian. (Qotrun, 2021)

Penelitian pertama yang akan diulas berjudul "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)" yang ditulis oleh (Fitriyah, Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 2020). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015, yang membatalkan larangan terhadap politik dinasti, pada proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini menyebutkan bahwa pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, banyak calon dari kerabat petahana yang maju dalam Pilkada 2015 dan seterusnya. Keputusan ini kemudian membuka jalan bagi politik dinasti untuk berkembang tanpa hambatan regulasi, dan fenomena ini terus berlanjut di Pilkada setelahnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana partai politik di Indonesia melaksanakan proses rekrutmen politik yang pada akhirnya mendukung maraknya calon berlatar belakang dinasti.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang menyebabkan suburnya politik dinasti adalah kelemahan dalam sistem rekrutmen politik partai yang tidak transparan dan pragmatis sehingga memungkinkan calon dari keluarga petahana lebih mudah mendapatkan dukungan partai, yang pada akhirnya mengurangi peluang bagi calon potensial lain yang mungkin memiliki kemampuan dan integritas lebih baik.

Penelitian kedua yang akan diulas selanjutnya berjudul "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia" yang ditulis oleh (Siti Witianti d. H., 2019). Penelitian ini menganalisis sejauh mana peran ketua umum partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah di Indonesia dimana sejak diberlakukannya pemilu serentak pada tahun 2015, proses pencalonan partai politik menjadi salah satu fungsi krusial dalam internal partai politik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, dengan fokus pada pengumpulan data melalui studi literatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya pilkada serentak pada tahun 2015, terdapat kecenderungan semakin menguatnya pengaruh ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Partai politik belum sepenuhnya berfungsi sebagai institusi demokratis yang mampu menyiapkan dan menghasilkan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, berintegritas tinggi, dan berwawasan luas. Sebaliknya, keputusan-keputusan strategis sering kali didominasi oleh kepentingan elit partai yang berpusat pada ketua umum.

Penelitian ketiga yang akan diulas selanjutnya berjudul "Pemilihan Kepala Daerah sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal: Studi di Provinsi Jambi Tahun 2015," yang ditulis oleh (Farisi, 2016). Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dinamika pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015 dan untuk mengetahui bagaimana Pilkada serentak berfungsi sebagai model baru untuk sirkulasi elit politik lokal di Provinsi Jambi serta bagaimana sistem serta seleksi rekrutmen partai politik

berperan dalam menentukan pasangan calon kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun partai yang dapat mengusung calon secara mandiri pada Pilkada serentak 2015 di Provinsi Jambi, baik di tingkat provinsi maupun lima kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa partai-partai politik harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. Dalam proses penentuan pasangan calon, partai politik sangat mengandalkan jasa survei, sehingga hanya calon dengan popularitas dan elektabilitas tinggi yang menjadi patokan utama. Partai-partai politik cenderung memilih calon yang memiliki hubungan keluarga dengan elit politik yang biasanya memiliki popularitas dan sumber daya. Hal Ini menciptakan lingkungan politik di mana sirkulasi elit cenderung didominasi oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan yang sudah mapan. Penelitian ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa sirkulasi elit politik lokal menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan representatif.

Penelitian keempat yang diulas berjudul "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," yang ditulis oleh (Martien Herna Susanti, 2017). Penelitian ini membahas fenomena dinasti politik dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik sering kali lebih didasarkan pada keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis sehingga menciptakan oligarki di dalam partai politik.

Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam masyarakat, terdapat upaya untuk menjaga status quo di daerah dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan petahana. Penelitian ini menyatakan bahwa pada Pilkada 2017 masih diwarnai oleh wajah-wajah lama yang merupakan keberlanjutan dari dinasti politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa oligarki dan dinasti politik dalam partai politik dan regulasi yang lemah merupakan hambatan utama bagi demokratisasi yang sejati.

Penelitian terakhir yang akan diulas berjudul "Proses Rekrutmen dan Seleksi Kandidat di Internal PDI Perjuangan pada Pilkada Cimahi Tahun 2017" yang ditulis oleh (Siti Witianti N. N., 2021). Penelitian ini mengkaji dinamika dan metode seleksi kandidat yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota di Kota Cimahi pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman holistik melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber dari unsur internal dan eksternal PDI Perjuangan.

Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam konteks negara demokrasi, partai politik diharapkan untuk melakukan perekrutan calon kandidat yang akan menduduki jabatan strategis secara transparan dan demokratis. Namun, pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017, pasangan calon yang terpilih bukan berasal dari kader internal PDI Perjuangan karena proses penjangkaran dilakukan secara terbuka untuk kader dan non-kader. Meskipun demikian, dominasi dan kuatnya kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam memutuskan hasil seleksi sangat mencolok. Proses penentuan calon bisa dikatakan dinamis di tingkat lokal, tetapi dinamika tersebut terhenti oleh kebijakan DPP yang

memiliki wewenang untuk memutuskan dan merekomendasikan calon untuk berkontestasi dalam Pilkada.

Melalui pembahasan penelitian terdahulu, peneliti telah menentukan posisi penelitian ini yaitu sebagai pengembangan dan pembaruan informasi sebagaimana praktik oligarki dan politik dinasti yang juga terus berkembang sehingga penelitian terkait hal ini perlu terus dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada dimana dari kelima penelitian terdahulu yang telah diulas menyepakati bahwa praktik oligarki dan politik dinasti telah merusak demokrasi. Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam mengenai fakta yang terjadi dalam internal kelembagaan PDI Perjuangan terkhusus saat kandidasi kepala daerah dilakukan dengan melibatkan oligarki dan politik dinasti.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Oligarki

Oligarki adalah suatu bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Sedangkan oligark (*oligarch*) adalah sebutan bagi mereka elit politik yang berwatak oligarkis (Koho, 2021). Para oligarkis ini memiliki pengaruh dominan dan dapat terkait dengan berbagai faktor, seperti kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, dan kekuatan militer. Oligarki dapat terjadi dalam berbagai bentuk pemerintahan baik itu yang otoriter hingga yang menganut demokrasi.

Seorang ilmuwan politik terkemuka bernama Jeffrey A. Winters telah membahas mengenai teori oligarki secara mendalam. Teori oligarki yang dikembangkan oleh Winters adalah salah satu pendekatan yang menyoroti bagaimana kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir individu kaya atau elit dalam berbagai sistem politik (Winters, 2011). Menurut Winters, inti dari oligarki adalah *wealth defense* atau kemampuan elit untuk melindungi kekayaan mereka dari ancaman redistribusi. Maksud dari redistribusi itu sendiri yaitu penyebaran kepada masyarakat luas atau yang bukan berasal dari kelompok oligarkinya. Jadi dapat dijelaskan bahwa oligarki ini enggan untuk membagi kekayaan bahkan “peluang mendapat kekayaan” kepada orang lain di luar kelompok oligarki mereka.

Dalam teori oligarki yang dibawa oleh Winters memperkenalkan pula konsep *Material Power Index* (MPI) untuk mengukur kekuatan material oligarki. MPI adalah indeks yang mengukur sejauh mana kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh segelintir individu dibandingkan dengan masyarakat luas. Indeks ini menggambarkan kemampuan oligarki untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik demi melindungi dan memperluas kekayaan mereka. Teori oligarki Winters pada dasarnya memberikan kerangka berpikir yang kuat dan *logic* untuk memahami hubungan antara kekayaan dan kekuasaan.

Dalam sistem oligarki terdapat siklus berkelanjutan antara kekayaan dan kekuasaan dimana kekayaan memungkinkan oligarki untuk memperoleh kekuasaan politik, dan kekuasaan politik kemudian

digunakan untuk menghasilkan atau melindungi lebih banyak kekayaan. Maka, kebutuhan oligarki terhadap kekuasaan politik sangatlah besar hingga sering kali mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membeli pengaruh politik melalui dukungan kepada partai politik atau kandidat tertentu dalam elektoral misalnya dengan pembiayaan kampanye, *lobbying*, *money politik* dan kontrol media. Dengan penguasaan politik, maka oligarki akan memiliki akses langsung terhadap pengambilan keputusan politik/publik untuk mempengaruhi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan oligarki. Partai politik maupun kandidat yang sebelumnya telah menerima dukungan dari oligarki akan memiliki hutang budi sehingga mereka memiliki tekanan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan oligarki.

Konsep dari hubungan hutang budi antara oligarki dan pelaku politik seperti partai politik dan kandidat elektoral ini biasa disebut sebagai patronase. Definisi dari patronase itu sendiri yaitu *“The patron-client relationship is a special case of dyadic (two-person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socio-economic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.”* (James C. Scott, 1972). Mengacu pada pendapat diatas, maka oligarki disini disebut sebagai patron karena memiliki status yang lebih tinggi dan berperan sebagai provider, sedangkan partai politik atau kandidat yang mendapat

dukungan secara langsung dari oligarki disebut sebagai klien, dimana klien akan memberikan imbalan berupa dukungan umum, bantuan, dan layanan pribadi kepada oligarki.

1.6.2 Teori Politik Dinasti

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015), politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Selaras dengan hal ini, Jeffrey A. Winters, seorang ahli politik yang merupakan pengemuka teori oligarki yang relevan untuk memahami teori politik dinasti mendefinisikan oligarki sebagai sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu yang memiliki kekayaan dan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Sedangkan, politik dinasti merupakan salah satu manifestasi dari oligarki di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keluarga. Politik dinasti bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaan di dalam keluarga, tetapi juga tentang mengamankan aset dan pengaruh politik yang dapat memastikan kelangsungan kekuasaan oligarki. (Winters, 2011)

Politik dinasti menciptakan struktur kekuasaan tertutup yang berarti bahwa kekuasaan politik dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keputusan kebijakan dikuasai oleh lingkaran keluarga yang sempit sehingga membatasi kesempatan bagi individu di luar keluarga tersebut untuk mendapatkan posisi kekuasaan. Proses ini dimulai ketika anggota

keluarga yang telah berhasil meraih posisi strategis dalam kekuasaan politik lalu kemudian mereka memperkuat posisinya dan membangun loyalitas dengan pihak-pihak pemangku kepentingan yang berkuasa (patronase), serta mengendalikan sumber daya ekonomi dan politik.

Menurut Cornelis Lay, dalam politik dinasti, keluarga yang berkuasa sering kali menggunakan patronase untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Patronase biasa digunakan untuk membangun dan memperkuat jaringan loyalitas yang melibatkan anggota keluarga, pendukung, dan pemilih. Dalam kasus yang lebih kompleks, patronase ini bisa meluas menjadi klientelisme dimana hubungan yang terjalin antara patron dan klien tidak lagi terjadi secara langsung tetapi melibatkan lebih dari dua pihak yang berlapis-lapis. (Cornelis Lay, 2010)

Keberhasilan politik dinasti pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dan pengaruh kuat keluarga dalam pencalonan keluarga lain. Anggota keluarga yang ingin masuk ke dalam politik cenderung mewarisi popularitas dan loyalitas konstituen serta jaringan patronase yang sudah dibangun oleh pendahulunya yang dapat meliputi hubungan dengan pemimpin partai, pendukung (patron), pihak yang diberi keuntungan (klien), dan dukungan tokoh masyarakat (influencer) yang memiliki kapasitas untuk mendukung pencalonan anggota keluarga yang baru. Selain itu, aspek keamanan sumber daya finansial juga merupakan pendukung dari keberhasilan politik dinasti.

1.6.3 Teori Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah proses dimana individu dipilih dan dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam peran politik, baik sebagai kandidat dalam pemilihan maupun sebagai pemimpin struktural partai. Pippa Norris, seorang ahli politik terkenal, telah mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif tentang rekrutmen politik yang menekankan pentingnya struktur, proses, dan kriteria rekrutmen. Norris menyoroti bahwa partai politik merupakan aktor penting dalam rekrutmen politik sebagai yang menentukan siapa yang layak menjadi calon dengan menetapkan kriteria dan prosedur seleksi. Partai politik juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan calon dengan memberikan pelatihan, pendidikan politik, dan serta menyediakan dukungan finansial dan logistik yang diperlukan oleh calon selama kampanye, termasuk akses ke sumber daya partai dan jaringan politik.

Teori rekrutmen politik yang dibawa Pippa Norris membedakan sistem rekrutmen politik ke dalam dua jenis yaitu terbuka dan tertutup. Dalam sistem rekrutmen terbuka memungkinkan partisipasi yang luas dari anggota partai atau bahkan di anggota eksternal partai untuk masuk dalam selektoral baik sebagai calon maupun penentu keputusan. Sebaliknya, sistem rekrutmen tertutup lebih membatasi proses seleksi kepada elit partai, yang artinya terkait dengan identifikasi selektoral lebih dan dalam hal pengambilan keputusan dibuat secara tertutup hanya oleh elit partai. (Pippa Norris, 2006).

Mekanisme rekrutmen politik umumnya melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang dimulai dengan identifikasi dan seleksi, dimana partai politik mencari calon potensial dari berbagai sumber, termasuk kader internal partai, tokoh masyarakat, dan profesional yang memiliki reputasi baik. Selanjutnya verifikasi administratif terhadap dokumen calon, seperti riwayat hidup, rekam jejak, dan kelengkapan syarat formal lainnya yang dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan yang mencakup wawancara, tes tertulis, dan presentasi visi-misi. Tahap terakhir yaitu kandidasi atau penetapan calon. Mekanisme rekrutmen ini dirancang untuk memastikan bahwa kandidat memiliki kapasitas dan integritas yang sesuai dengan tujuan dilakukannya rekrutmen politik.

1.7 Operasional Konsep

Operasional konsep berisikan uraian yang menjabarkan konsep teoritis menjadi indikator-indikator yang dapat diukur secara empiris. Fungsi dari penjabaran konsep teoritis menjadi indikator yang bersifat empiris ini adalah untuk mengkorelasikan antara teori yang peneliti pakai sebagai landasan analisis permasalahan dengan data empiris yang peneliti pakai dalam proses analisis.

1.7.1 Mekanisme Rekrutmen Pencalonan Kepala Daerah oleh Partai Politik

Mekanisme rekrutmen pencalonan kepala daerah oleh partai politik adalah serangkaian proses dan prosedur yang digunakan oleh partai politik untuk memilih dan menetapkan calon kepala daerah yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Indikator yang digunakan dalam melihat mekanisme rekrutmen pencalonan kepala daerah oleh partai politik meliputi proses seleksi internal dan transparansi proses.

1.7.1.1 Proses Seleksi Internal

Tahapan yang dilalui oleh calon kepala daerah dalam partai, meliputi seleksi administratif, wawancara, dan pemilihan internal. Termasuk pada aspek kriteria penilaian yang digunakan oleh partai politik untuk memilih calon kepala daerah, seperti popularitas, pengalaman politik, dan loyalitas terhadap partai.

1.7.1.2 Transparansi Proses

Tingkat keterbukaan proses rekrutmen kepada masyarakat sebagai konstituennya, serta mengenai keterlibatan anggota dalam proses seleksi yang melalui pemilihan dan musyawarah.

1.7.2 Oligarki dalam Partai Politik

Oligarki partai politik adalah kondisi di mana kekuasaan dan kontrol dalam sebuah partai politik dikuasai oleh sekelompok kecil elit partai, yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan-keputusan strategis seperti pengangkatan kepemimpinan dan arah kebijakan partai. Indikator yang dapat dipakai untuk melihat adanya oligarki dalam partai politik meliputi struktur kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan proses seleksi kandidat partai.

1.7.2.1 Struktur Kepemimpinan Partai Politik

Oligarki dalam partai politik salah satunya dapat dilihat dari bentuk struktur kepemimpinannya, yakni penguasaan posisi-posisi strategis dalam partai politik oleh kelompok elit tertentu yang memiliki kendali besar terhadap kebijakan dan keputusan internal partai.

1.7.2.2 Proses Pengambilan Keputusan Kandidasi

Konsentrasi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan partai yang didominasi oleh sekelompok kecil elit, mengabaikan partisipasi anggota partai yang lebih luas atau bersifat sentralistik. Proses kandidasi merupakan hal terpenting yang menjaga eksistensi partai, dalam proses kandidasi ini partai oligarkis akan membuat keputusan yang memihak patronnya dibanding dengan menjaga aspirasi dan loyalitas kader internalnya.

1.7.3 Politik Dinasti dalam Pencalonan Kepala Daerah

Politik dinasti dalam pencalonan kepala daerah adalah praktik di mana individu yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pejabat politik yang sedang atau pernah berkuasa menggunakan koneksi tersebut untuk mencalonkan diri dan memperoleh posisi kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. Indikator yang dapat dipakai untuk melihat adanya politik dinasti dalam pencalonan kepala daerah meliputi keterlibatan keluarga dalam proses pencalonan dan pengaruh keluarga dalam pencalonan.

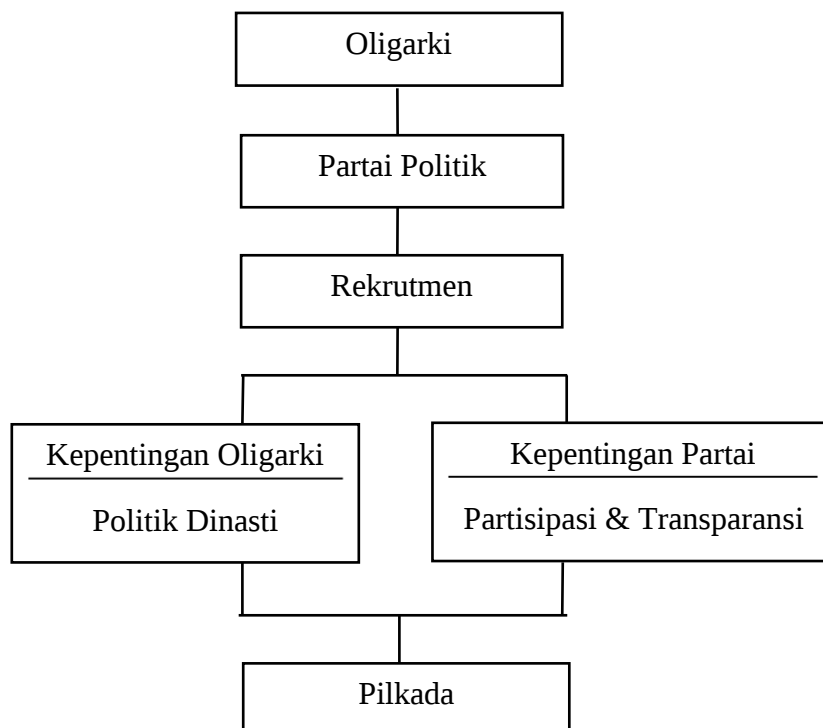
1.7.3.1 Keterlibatan Keluarga dalam Pencalonan Kepala Daerah

Keterlibatan keluarga dapat dilihat dari riwayat politik keluarga di daerah tersebut yaitu mengenai posisi strategis yang dipegang oleh anggota keluarga di pemerintahan atau partai politik serta penggunaan jaringan keluarga untuk mendapatkan dukungan politik dan suara dalam pemilihan.

1.7.3.2 Pengaruh Keluarga dalam Pencalonan Kepala Daerah

Keuntungan yang didapatkan calon kepala daerah dari keluarganya yang berupa dukungan finansial, endorsement politik, serta pengaruh yang dimiliki keluarga dalam menentukan pencalonan di dalam partai politik.

1.8 Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan paradigma kritis. Paradigma kritis bertujuan untuk mengungkap dan mengubah kondisi sosial yang tidak adil dengan menganalisis struktur kekuasaan, ideologi, dan ketimpangan sosial. Paradigma ini berakar pada teori kritis yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt dan menekankan pentingnya memahami bagaimana ideologi dan struktur kekuasaan membentuk realitas sosial. Menurut Kriyantono, paradigma kritis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menantang kekuasaan dan ideologi dominan dalam masyarakat. (Kriyantono, 2021). Penelitian dengan paradigma kritis memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu emansipasi, reflektivitas, partisipasi, dan transformasi.

Kelebihan paradigma kritis yaitu dapat mendekatkan pada temuan yang mendorong perubahan sosial dan keadilan, memberikan suara kepada kelompok yang terpinggirkan, serta untuk mengungkap hubungan kekuasaan yang tersembunyi dalam masyarakat. Dengan pendekatan paradigma kritis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap ketidakadilan dalam mekanisme kandidasi yang dilakukan PDI Perjuangan dalam Pilkada Surakarta 2020, serta dapat mengungkapkan bagaimana terdapat keterlibatan oligarki dan politik dinasti dalam proses pencalonan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan kritis yang dimuat dalam rumusan masalah penelitian.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang dibutuhkan informasinya sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Segala informasi yang diambil adalah yang berkaitan dengan PDI Perjuangan, dapat meliputi struktural partai, keanggotaannya, jejaring atau relasi internal partai, kebijakan partai, risalah partai berupa dokumen resmi, pemberitaan pers, media massa, atau studi kepustakaan yang berguna dalam proses analisis permasalahan serta untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini.

Subjek kedua dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap valid dan memenuhi kriteria untuk dijadikan narasumber utama penelitian berdasarkan teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling* mampu menghasilkan data yang lebih relevan karena sebagai syarat pemilihannya adalah informan merupakan seorang ahli atau pakar dari studi kasus yang sedang diteliti serta memiliki karakter sebagai narasumber yang mampu memberikan wawasan. Dalam penelitian ini, narasumber utamanya adalah Fx. Hadi Rudianto yang merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses penjangkaran internal yang telah dilakukan DPC dan mampu memberikan jawaban mengenai hasil kandidasi yang ditetapkan DPP PDI Perjuangan.

Pemilihan informan selanjutnya adalah menggunakan teknik *snowball sampling*. Snowball Sampling adalah teknik untuk mengumpulkan sampel di mana informan utama yaitu Fx. Hadi Rudyatmo memberikan rujukan baru sesuai dengan yang diperlukan untuk memperdalam analisis penelitian. Adapun rujukan yang diberikan oleh Fx. Hadi Rudyatmo berjumlah 3 orang yaitu: YF. Sukasno, S.H. yang merupakan kader internal partai dan menjabat dalam struktural sebagai Wakil Ketua DPC Bidang Organisasi Keanggotaan dan Rekrutmen Kaderisasi, sehingga mampu memberikan informasi terkait dengan proses rekrutmen dan kaderisasi dari PDI Perjuangan terkhusus di tingkat Surakarta. Informan kedua yang dirujuk adalah Suharsono, S.H., M.H. yang telah berada berada dalam struktural partai selama 24 tahun dan kini menjadi Wakil Ketua DPC Bidang Politik, Hukum, HAM dan Aspirasi Rakyat. Informan ketiga yang dirujuk yaitu Honda Hendarto yang saat ini menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan dalam DPRD Kota Surakarta, akan tetapi dalam proses penetapan jadwal, informan ini tidak dapat memenuhi kesediaan menjadi narasumber akibat jadwalnya yang sibuk sehingga didisposisikan kepada Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA., yang menjabat sebagai ketua sayap partai merah putih. Dalam hal pengalaman, semua calon yang dirujuk merupakan anggota DPRD Kota Surakarta sehingga mereka telah mengalami berbagai proses rekrutmen dan dianggap kompeten baik dalam hal pengetahuan dan pengalaman.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan pusat penelitian atau tempat berlangsungnya penelitian serta tempat pengambilan data dalam penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta yaitu tempat isu permasalahan ini ditemukan. Selain itu, semua informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini bertempat tinggal di Kota Surakarta sehingga peneliti memilih Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian hingga menjadi lokasi penulisan hasil penelitian.

1.8.4 Sumber Data

1.8.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung melalui sumber yang menjadi informan melalui pengumpul data atau penelitian.

Data primer dapat diperoleh melalui beberapa cara seperti melalui wawancara langsung dengan informan, observasi, survei dan eksperimen yang dilakukan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer telah diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan; Fx. Hadi Rudiatmo; YF. Sukasno, S.H.; Suharsono, S.H., M.H.; dan Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.,

1.8.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian yang berhubungan dengan kondisi di lapangan yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip pada instansi terkait maupun data kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, maupun internet sebagai bahan penunjang untuk mendukung dan memperkuat data primer yang ada. (Djam'an S, dan Aan K, 2011).

Data sekunder dalam penelitian ini telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan pendokumentasian arsip-arsip berita dan juga laporan hasil survey yang peneliti dapatkan melalui media massa elektronik. Peneliti juga mengambil data secara langsung dari website resmi milik PDI Perjuangan, Badan Pusat Statistika (BPS) dan juga pendokumentasian media sosial.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1.8.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi maupun ide melalui sebuah kegiatan tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara telah dilakukan terhadap ketua DPC PDI Perjuangan yaitu Fx. Hadi Rudyatmo yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 di Surakarta kemudian wawancara juga dilakukan terhadap informan rujukan yang peneliti dapatkan sebagai rekomendasi dari Fx. Hadi Rudyatmo yaitu YF. Sukasno, S.H., pada 13 Juni 2024 di Surakarta, Suharsono, S.H., M.H. pada 13 Juni 2024 di Surakarta, dan Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA., pada 19 Juni 2024 di Surakarta.

1.8.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencatat data-data yang sebelumnya sudah tersedia. Data-data tersebut dapat bersumber dari laporan kegiatan, pemberitaan, ataupun dokumen lainnya. Pengumpulan data berupa dokumentasi kemudian akan ditinjau dan dipilih relevansinya dengan topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang peneliti pakai adalah AD/ART Partai PDI-P, dokumen pemberitaan mengenai situasi politik di Kota Surakarta pada tahun 2019-2020, dokumen pemberitaan pilkada, dokumen pemberitaan mengenai PDI-P Cabang Surakarta, data statistik yang dirilis BPS, Hasil survey pra eleksi milik Unisri dan Lembaga Survey Median, dan berbagai publikasi penelitian yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengeksplorasi data yang bersifat tidak terstruktur alias kualitatif. Teknik kualitatif tepat digunakan untuk mempelajari populasi yang sulit dijangkau atau orang dengan karakteristik tertentu yang mungkin sulit diidentifikasi. (Minlab 2, n.d.).

Penyajian data dan hasil dalam penelitian ini berupa kata-kata atau tulisan yang akan diarahkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah peneliti muat dalam rumusan masalah. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1.8.6.1 Reduksi Data

Pada tahap reduksi data terjadi proses pengurangan data yang telah dikumpulkan menjadi data yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Tahap ini meliputi pemilihan data yang relevan, penghapusan data yang tidak relevan, dan pengelompokan data yang serupa. Dalam penelitian ini, peneliti telah mereduksi data primer dan sekunder yang telah di peroleh melalui wawancara dan studi dokumen.

1.8.6.2 Penyajian Data

Pada tahap kedua yaitu penyajian data, terjadi proses penyusunan data dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi untuk memudahkan pemahaman pembaca. Penyajian data dilakukan dengan tujuan memudahkan peneliti dalam melihat gambaran penelitian secara komprehensif. Pada penelitian ini, peneliti telah menyajikan data berupa narasi deskriptif yang berkaitan dengan dominasi oligarki dan politik dinasti dalam pencalonan Partai PDI Perjuangan pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020.

1.8.6.3 Penarikan Kesimpulan.

Pada tahap penarikan kesimpulan, terjadi proses pengambilan kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan pengujian kesimpulan tersebut. Dalam melakukan penarikan kesimpulan harus didukung dengan adanya bukti-bukti atau data-data yang terverifikasi. Kesimpulan ini akan menjadi pokok atau inti dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat akhir atau kesimpulan berdasarkan pada uraian penjelasan yang termuat dalam hasil penelitian dimana bagian kesimpulan ini biasanya telah memuat pendapat pribadi peneliti. Adapun dalam penelitian ini, peneliti telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang termuat dalam sub bab rumusan masalah. Melalui penarikan kesimpulan, diharapkan penelitian ini memberikan hasil seperti yang telah tertulis dalam tujuan penelitian.

(Gramedia Literasi, 2021).